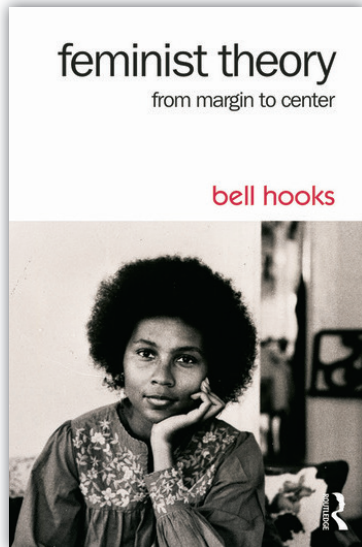


FEMINIST THEORY FROM MARGIN TO CENTER



Judul Buku	: <i>Feminist Theory from Margin to Center</i>
Bahasa	: Inggris
Penulis	: Bell Hooks
ISBN	: 9781138821651
Terbit	: 2015
Dimensi	: 14 x 21 cm
Tebal	: xviii + 179 halaman
Penerbit	: Routledge
Peresensi	: Oinike Natalia Harefa*

Bell Hooks menawarkan sebuah pedoman untuk membangun gerakan feminis yang berbasis massa. Persoalan rasisme, kelas, dan gender menjadi perhatian utama bagi Hooks. Ia menekankan bahwa tulisan feminis dibutuhkan untuk berbicara kepada semua orang dari berbagai kalangan dan bahwa tanpa itu pendidikan feminis dengan kesadaran kritis tidak dapat terjadi (Hooks 2015, xiii). Gerakan feminis telah menciptakan perubahan positif yang mendalam bagi kehidupan anak-anak perempuan dan laki-laki, perempuan dan laki-laki, kehidupan dalam masyarakat kita, dalam politik sistem imperialis, supremasi kulit putih, dan patriarki kapitalis. Hooks menggagas bahwa kekuatan gerakan feminis terletak pada pembentukan lingkungan intelektual yang kritis dan pada pertukaran pemikiran dialektis yang berkelanjutan. Bagi Hooks, tidak ada gerakan keadilan sosial lain dalam masyarakat yang telah kritis terhadap diri sendiri sebagaimana gerakan feminis. Kesiediaan feminisme untuk mengubah arah ketika dibutuhkan telah menjadi sumber utama kekuatan dan vitalitas dalam perjuangan feminis (Hooks 2015, xiv). Kritik internal itu penting bagi politik transformasi apa pun. Sama seperti hidup kita yang tidak statis tetapi selalu berubah, demikian pula sebuah teori mesti tetap cair, terbuka, dan responsif terhadap informasi baru.

Hooks mengawali bukunya dengan memberi kritik terhadap feminisme kulit putih yang berbeda dengan persoalan dan pengumpulan perempuan lainnya. Banyak perempuan yang lebih bergumul dengan persoalan kelangsungan hidup seperti: ekonomi, etnis, dan diskriminasi rasial ketimbang persoalan politik. Selama ini perempuan kulit putih mendominasi wacana feminis, akibatnya merekalah

* Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta. Korespondensi: oinike.harefa@stftjakarta.ac.id

yang mengambil bagian paling banyak dalam menciptakan dan mengartikulasikan teori feminis. Persoalannya adalah mereka tidak memiliki pengalaman dan pemahaman akan ketidakadilan yang disebabkan oleh supremasi kulit putih sebagai politik rasial, psikologis kelas, serta status politik dalam negara kapitalis yang rasis dan seksis.

Hooks kemudian membuka wacana tentang feminisme dan persoalan pada definisinya. Baginya, feminisme adalah perjuangan untuk mengakhiri penindasan seksisme. Tujuan feminisme bukan untuk menguntungkan kelompok perempuan tertentu, ras tertentu, atau kelas tertentu. Feminisme juga tidak bertujuan untuk mengunggulkan perempuan di atas laki-laki. Yang paling penting, feminisme bukanlah gaya hidup atau identitas yang sudah jadi atau suatu peran yang bisa dimasuki. Energi dari gerakan feminis bertujuan untuk mengubah masyarakat. Kerinduan untuk komunitas, koneksi, dan tujuan bersama, telah banyak membantu perempuan menemukan jejaring dukungan dalam organisasi feminis (Hooks 2015, 34).

Solidaritas dan persaudaraan antar perempuan adalah hal yang esensial. Meskipun gerakan feminis kontemporer telah menyediakan tempat pelatihan bagi para perempuan untuk belajar tentang solidaritas politik, perihal persaudaraan tidak dipandang sebagai pencapaian revolusioner perempuan. Ia mengkritik visi persaudaraan yang didasarkan pada gagasan bahwa perempuan telah mengalami “penindasan bersama”. Gagasan penindasan bersama ini adalah platform palsu dan korup yang menyamarkan dan membingungkan hakikat realitas sosial perempuan yang beragam dan kompleks. Perempuan telah terbagi-bagi oleh seksisme, rasisme, hak istimewa kelas, dan prasangka lainnya. Ikatan perempuan

yang berkelanjutan hanya dapat terjadi ketika segregasi dan perpecahan ini dihadapi dengan adanya langkah-langkah yang diperlukan. Dalam gerakan feminis, perempuan dan laki-laki bukanlah musuh satu sama lain. Yang harus dilawan adalah sosialisasi yang mengajarkan kita untuk membenci diri sendiri dan membenci satu sama lain. Laki-laki yang secara aktif berjuang melawan seksisme mendapat tempat dalam pergerakan feminis. Mereka adalah rekan kita.

Hooks juga berkisah bahwa dalam masyarakat kita, kekuasaan biasanya disamakan dengan dominasi dan kemampuan mengendalikan orang atau benda. Gerakan feminis memiliki tanggapan ambivalen terhadap masalah kekuasaan. Pada satu sisi, ada banyak pengikut gerakan feminis yang dengan tulus percaya bahwa perempuan berbeda dari laki-laki dalam menjalankan kekuasaan. Perebutan kekuasaan (hak untuk mendominasi dan mengendalikan orang lain) terus-menerus melemahkan gerakan feminis dan cenderung mempercepat kematiannya. Pada perebutan kekuasaan, perempuan perlu waspada agar tidak mengimitasi cara-cara laki-laki memperoleh kekuasaan. Pada sisi lain, ada gagasan tentang kekuatan perempuan untuk mengakhiri dominasi. Perempuan dapat menolak definisi yang kuat dari realitas bahwa mereka dapat berkuasa bahkan jika mereka miskin, tereksplorasi, atau terjebak dalam situasi yang menindas.

Hooks juga berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh politik seksisme dan supremasi laki-laki: hak laki-laki untuk mendominasi perempuan. Hooks berpandangan bahwa kekerasan terkait erat dengan semua tindakan kekerasan dalam masyarakat yang terjadi antara yang kuat dan yang tidak berdaya, yang dominan dan yang

didominasi. Sementara supremasi laki-laki mendorong penggunaan kekuatan kekerasan untuk mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan. Gagasan filosofi Barat dengan aturan hierarkis dan otoritas koersif menjadi akar penyebab kekerasan terhadap perempuan hingga kekerasan orang dewasa terhadap anak. Sistem kepercayaan inilah yang menjadi fondasi dari ideologi seksis dan ideologi penindasan kelompok lainnya. Sistem ini dapat dihilangkan hanya ketika fondasi tersebut dihilangkan. Upaya feminis untuk mengakhiri kekerasan laki-laki terhadap perempuan harus diperluas menjadi gerakan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan.

Kemerdekaan seksualitas menjadi syarat pembebasan. Perempuan didukung untuk memulai kemajuan seksual, menikmati seks, bereksperimen dengan hubungan baru, dan menjadi “bebas” secara seksual. Namun kebanyakan perempuan tidak melakukannya sebab tidak memiliki waktu luang, mobilitas, relasi, atau bahkan keinginan untuk memanjakan diri dalam apa yang disebut “kebebasan seksual” ini. Kelompok perempuan heteroseksual muda, lajang, dan tidak memiliki anak; remaja dan mahasiswa; dan politik progresif adalah kelompok yang paling bersemangat dan mampu membuat pola perilaku seksual mereka. Hal ini masih menjadi kontroversi. Banyak perempuan juga merasa kecewa dengan gagasan kebebasan seksual. Sementara beberapa orang di kalangan feminis terus menekankan pentingnya kebebasan seksual. Gerakan feminis melawan eksploitasi terhadap seksualitas perempuan. Upaya feminis untuk mengembangkan teori politik seksualitas harus terus berlanjut hingga penindasan seksis dihilangkan. Walau demikian, perjuangan untuk mengakhiri penindasan seksual hanyalah satu komponen. Perjuangan yang lebih besar adalah

untuk mengubah masyarakat dan membangun tatanan sosial baru.

Bagi Hooks, untuk membangun gerakan feminis yang berbasis massa diperlukan ideologi pembebasan yang dapat dibagikan kepada semua orang. Revolusi ideologi dapat diciptakan hanya jika pengalaman orang-orang yang terpinggirkan dan yang menderita oleh penindasan seksis dan penindasan bentuk-bentuk kelompok lainnya dapat dipahami, ditangani, dan diikutsertakan. Mereka harus berpartisipasi dalam gerakan feminis sebagai pembuat teori dan sebagai pemimpin tindakan.

Feminist Theory from Margin to Center sangat diperlukan untuk memeriksa ulang sistem pendidikan kita yang selama ini masih berpusat pada kuasa yang dominan. Buku ini secara khusus membongkar bagaimana rasisme dan seksisme masih menjadi kenyataan yang ada di dunia pendidikan kita di masa kini. Di masa kini, “remah-remah” kolonialisme dan imperialisme masih diwarisi oleh pendidikan Kristen. Selaras dengan Hooks, J. Willinsky memaparkan tiga bentuk manifestasi jejak kolonial dalam dunia Pendidikan (Willinsky 1998). Pertama adalah paham rasisme. Konstruksi ide rasisme telah memperkuat gagasan superioritas budaya Barat yang berpengaruh besar pada sistem pendidikan di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan. Kedua adalah kondisi sistem pendidikan di mana naradidik kurang bersuara untuk mengekspresikan minatnya. Ketiga adalah kurikulum pendidikan yang hanya menawarkan pengetahuan namun tidak berdasarkan pada minat naradidik. Untuk menuju pendidikan yang membebaskan, maka rantai dan jejak kolonialisme dalam dunia pendidikan mesti diputus.

Ada beberapa hal menarik dari buku Hooks. Pertama adalah bagaimana ia mendefinisikan apa itu feminisme dengan

mempertimbangkan konteks perempuan yang sangat beragam, terutama perempuan-perempuan yang selama ini mengalami marginalisasi. Gerakan feminis telah lama didominasi oleh perempuan-perempuan berkulit putih kelas menengah. Hooks melakukan kritik pada feminisme masa lalu yang tidak peka dengan persoalan seksisme, rasisme, dan kolonialisme yang dialami secara langsung maupun diwarisi dampaknya oleh perempuan-perempuan di garis margin. Kelebihan tulisan Hooks adalah ia tidak hanya melakukan kritik atas feminisme di masa lalu. Ia juga menawarkan gagasannya bahwa gerakan feminis dapat mengubah relasi sehingga keterasingan, persaingan, dan dehumanisasi yang mencirikan interaksi manusia dapat diganti dengan perasaan keintiman, kebersamaan, dan persahabatan. Hooks berulang kali pada buku ini mengutip pikiran Freire bahwa pendidikan adalah “praktik pembebasan”. Pembebasan lewat pendidikan bagi perempuan akan terwujud ketika metodologi pendidikan yang menjawab kebutuhan semua perempuan.

Kedua, tulisan Hooks memberi perhatian besar pada lokus kekuasaan dalam dunia pendidikan sehingga pemetaan yang “pusat” dan “pinggiran” menjadi penting dalam tulisannya. Belakangan memang muncul persoalan pada penggunaan istilah “pusat” dan “pinggiran”. Letak yang “pusat” dan yang “pinggiran” menjadi kabur bila disorot berdasarkan lapis kekuasaan. Bagi beberapa negara maju di Eropa atau Amerika, daerah lain dapat menjadi pinggiran, namun sebaliknya daerah pinggiran pada wilayah negara maju justru dapat menjadi pusat karena menjadi penentu bagi daerah-daerah lain yang lebih terpinggirkan lagi. Walau demikian, saya tetap setuju pada penggunaan istilah ini sejauh ia menegaskan realita bahwa pada konteks tertentu terjadi akumulasi kekuasaan yang menyebabkan daerah dan

masyarakat lainnya mengalami ketidakadilan. Pada konteks Asia, pendekatan yang mengkritisi pola relasional dari “pusat” ke “pinggiran” juga telah dilakukan oleh beberapa ahli. Gayatri Spivak, misalnya, menggunakan pendekatan refleksi diri untuk menganalisis praktik-praktik dimana perempuan dipresentasikan dalam masyarakat yang pernah mengalami penjajahan bangsa Barat (Spivak 1988). Kwok Pui-Lan juga melakukan kritik yang sama dari sudut pandang perempuan Asia. Ia menawarkan kritik pasca-kolonial yang menantang universalisme dan hegemoni Barat serta menekankan pentingnya suara dari Asia (Pui-lan 2000, 46). Melalui kritik pasca-kolonial, kaum yang selama ini dimarginalkan diberi ruang untuk bersuara (Shital V. 2012, 284).

Perhatian Hooks mengenai “pusat” dan “pinggiran” mengingatkan saya pada konteks Nias, Indonesia. Di konteks Nias, saya menyaksikan betapa sulitnya para perempuan Nias generasi sebelum saya untuk bersekolah. Saudari-saudari perempuan ayah saya tidak ada satupun yang menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar. Mereka harus bekerja menyadap karet untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga uang sekolah saudara laki-laki mereka. Saya merasa beruntung bisa lahir di generasi saat ini, dimana sekolah sudah diwajibkan kepada anak-anak perempuan. Walau demikian, prioritas untuk pendidikan tinggi masih diberikan kepada anak laki-laki ketimbang anak perempuan di Nias. Ada begitu banyak perempuan Nias lainnya yang masih belum memiliki akses pada dunia pendidikan dasar alih-alih pendidikan tinggi. Melalui ini saya ingin menunjukkan bahwa di daerah terpinggirkan seperti Nias, masih ada lapis masyarakat yang lebih terpinggirkan lagi. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang juga mampu merangkul yang lebih marginal di antara yang marginal.

Ketiga, Hooks memandu pembaca melalui analisis yang hampir lengkap tentang lapis kekuasaan dan juga dominasi pada dunia rasisme. Menarik bahwa pada satu bab dalam bukunya, Hooks secara khusus membahas bagaimana feminisme terhubung dengan persoalan kekuasaan. Apakah cara perempuan berkuasa berbeda dengan cara laki-laki berkuasa? Bagi Hooks, gerakan feminisme perlu mewaspadaai paham liberal yang mendorong perempuan untuk percaya bahwa pencapaian individu dalam meraih kesuksesan, uang, dan kekuasaan (terutama di bidang yang secara historis didominasi oleh laki-laki) memajukan pergerakan feminis. Perempuan-perempuan ini perlu tahu bahwa kesuksesan individu hanya memiliki dampak yang kecil terhadap status sosial perempuan secara kolektif dan tidak mengurangi keparahan penindasan seksis atau menghilangkan dominasi laki-laki. Individualisme tersebut sangat narsistik, apalagi bila mereka menyamakan kesuksesan pribadi dengan gerakan politik radikal. Prestasi individu memajukan gerakan feminis hanya terjadi jika mereka melayani kepentingan kolektif dalam perjuangan feminisme. Kekuasaan dalam gerakan feminis mesti dieksekusi untuk melawan eksploitasi dan penindasan, serta membebaskan dan mengubah masyarakat dalam struktur politik dan ekonomi yang menguntungkan perempuan dan laki-laki secara setara.

Rasisme masih terwujud dalam sistem pendidikan kita yang belum memberi penghargaan pada pendidikan dalam negeri. Ketika saya memilih untuk melanjutkan studi doktoral saya di STFT Jakarta, saya sering kali mendapat pertanyaan, “Mengapa tidak melanjutkan sekolah di Eropa atau di Amerika?” Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya mengandung pesan bahwa pendidikan yang terbaik itu selalu berkiblat di dunia Barat dan

tidak di Asia, apalagi di Indonesia. Pusat-pusat intelektual termasuk feminis sekalipun juga masih dipahami berasal dari dunia Barat. Sebaliknya, saya bersyukur bahwa bersekolah di dalam negeri juga memiliki keunggulan tersendiri yang membuat saya lebih dekat pada akar masalah dan konteks kehidupan masyarakat dimana saya melayani dan mengajar. Sembari saya juga mengasah kepekaan bahwa ada banyak saudari-saudari saya perempuan Nias yang tidak seberuntung saya, yang tidak mengalami proses seperti saya, dan kepada mereka saya berutang dan terbeban untuk turut dalam proses pembebasan lewat pendidikan.

Keempat, saya melihat bahwa ada hal yang belum disentuh oleh Hooks dalam tulisannya, yakni mengenai konteks keragaman agama dalam pendidikan. Secara khusus untuk konteks Indonesia, pendidikan agama Kristen dan feminisme tidak bisa tidak berbicara tentang keragaman agama. Hooks berbicara banyak tentang konteks rasisme, klasisme, patriarkalisme, namun ia belum menyentuh persoalan segregasi yang diakibatkan oleh hubungan antar-agama yang terpecah. Hal ini menjadi tambahan pemikiran saya pada tulisan Hooks dari konteks Indonesia. Perempuan yang berkecimpung dalam studi lintas agama dan budaya sebagai ahli masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Jeanin Hill Fletcher mengungkapkan bahwa di balik eksklusi perempuan dalam percakapan antar-agama, terdapat masalah struktural agama (Fletcher 2017, 12–13).¹ Struktur androsentris tidak melibatkan perempuan dalam praktik normatif.

Pendidikan yang membebaskan di Indonesia sudah seharusnya juga berbicara tentang perempuan lintas agama dan budaya di masa kini dan masa depan. Dalam perkembangan promosi antar-budaya, perempuan oleh UNESCO diperhitungkan sebagai “suara baru” (UNESCO 2009).

Perempuan sebagai “suara baru” adalah agen perubahan budaya yang memiliki peran penting dalam proses validasi dan reinterpretasi budaya dan praktik. Perempuan tidak hanya berperan sebagai “pembawa nilai”, melainkan juga “pencipta nilai”. Hal ini terjadi karena kontribusi gerakan feminis. Nilai-nilai feminisme tersebut terbentuk melalui bahasa, kode etik, sistem nilai, dan kepercayaan yang diwariskan oleh perempuan kepada generasinya. Perempuan memiliki kemampuan otonom yang tidak hanya secara individu melainkan juga komunitas masyarakat yang lebih luas untuk bergerak dan menciptakan nilai transformasional bersama. Untuk itu, perempuan terus menyuarakan haknya dalam akses publik, hak sipil dan politik, kesetaraan di dunia privat. Perempuan juga terus menyuarakan keadilan multi-dimensi seperti rumah tangga, pasar, dan kepemilikan properti. Perempuan di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena memiliki pengalaman hidup, cara pandang, dan pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan antar-agama. Keunikan ini tentunya dapat menjadi sumber pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dari keempat catatan saya pada karya Hooks, saya secara personal sangat mengapresiasi tulisan Hooks dan ketajaman pikirannya untuk membedah lapis persoalan rasisme, klasisme, kolonialisme, dan patriarkalisme dalam dunia pendidikan di masa lalu dan juga yang masih terjadi di masa kini. Desentralisasi pendidikan pada pusat sangat dibutuhkan demi keadilan bagi yang terpinggirkan adalah harapan Hooks dari tulisannya. Walau demikian, konteks setiap daerah memiliki kebutuhannya sendiri. Di Indonesia, feminisme dan pendidikan mesti juga berbicara tentang keragaman pengalaman dan potensi perempuan lintas iman demi kemajuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Fletcher, Jeanin Hill. 2017. “Who Speaks for Peace: Women and Interreligious Peace Making.” *Interreligious Studies and Intercultural Theology*: 12–13. <https://journals.equinoxpub.com/index.php/ISIT/article/download/31725/pdf>.
- Hooks, Bell. 2015. *Feminist Theory: From Margin to Center*. London: Routledge.
- Pui-lan, Kwok. 2000. *Introducing Asian Feminist Theology*. Sheffield: Sheffield Academic.
- Qurtuby, Sumanto Al. 2013. “Reconciliation from Below: Indonesia’s Religious Conflict and Grassroots Agency for Peace.” *the Canadian Journal of Peace and Conflicts Studies Peace Research* 44:45, no. 2/1: 145–146.
- Shital V., Gunjate. 2012. “Postcolonial Feminist Theory: An Overview.” In *Proceedings of National Seminar on Postmodern Literary Theory and Literature*, Nanded: 284.
- Spivak, Gayatri. 1988. *The Subaltern Speak?* Chicago: University of Illinois Press.
- UNESCO. 2009. *World Report: Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue*. Paris.
- Willinsky, J. 1998. *Learning to Divide the World: Education at Empire’s End*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Catatan:

- ¹ <https://journals.equinoxpub.com/index.php/ISIT/article/download/31725/pdf>.